

& Community Services & Social Work Bulletin

Community Services and
Social Work Bulletin

Volume 5

Nomor 2

Page 41-106

Tahun 2025

e-ISSN 2828-027X



Community Services & Social Work Bulletin

PENGUATAN LITERASI MASYARAKAT TENTANG BAHAYA HUMAN TRAFFICKING DI DESA BERAKIT, KABUPATEN BINTAN

Azhari Setiawan¹, Azrul Asyikin^{1,2*}, Ryan Anggria Pratama¹, Okky Rizki Azizi¹, Adhe Fadli Farhan¹ **41 - 50**

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

² Pusat Penelitian Asia Tenggara dan Pengelolaan Perbatasan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

TRANSFORMING FINANCIAL BEHAVIOR AND GOVERNANCE THROUGH COMMUNITY-BASED EDUCATION: LESSONS FROM YOUTH AND MSMEs IN INDONESIA

Ahmad Arif Fadilah¹, Achmad Fauzi^{2*}, Sholihin³ **51 - 61**

¹ Universitas Muhammdiyah Tangerang, Indonesia

² Universitas Muhammdiyah Tangerang, Indonesia

³ Universitas Pamulang, Indonesia

KEBIJAKAN PRO-UMKM DALAM HILIRISASI PRODUK PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KEPULAUAN RIAU

Eki Darmawan^{1*}, Adhe Fadli Farhan¹, Azrul Asyikin¹, Akhdiva Elfi Istiqoh¹, Ida Rahayu¹, Rio Ramadan¹ **62 - 71**

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

STRENGTHENING INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS OF HOTEL RECEPTIONISTS THROUGH A COMMUNITY-BASED TOURISM APPROACH IN LANTA NICE BEACH RESORT, THAILAND

Meerah Siwa^{1*}, Tiktik Dewi Sartika¹, Sri Utami¹, Abdul Rohim¹ **72 - 80**

¹ Universitas Muhammdiyah Tangerang, Indonesia

REVITALIZATION OF MARGA MULYA VILLAGE'S FLAGSHIP PRODUCTS THROUGH ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PACKAGING INNOVATION AND DIGITAL SALES STRATEGIES

Arief Bowo Prayoga Kasm^{1*}, Diah Fistiani Sukardiman², Novena Ulita³, Muhammad Raafi Hillal Atha'Ullah Azmi⁴, Meisya Putri⁵, Ravel Setyo Bintoro⁶ **81 - 94**

^{1,2,6} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

³ Fakultas Design Seni Kreatif, Universitas Mercu Buana, Indonesia

⁴ Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Indonesia

⁵ Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana, Indonesia

WHATSAPP BUSINESS WORKSHOP AS A DIGITAL MARKETING PRACTICE TOOL FOR MARKETING STUDENTS OF SMK IQRO PASAR KEMIS

Lukman Azhari¹, Syepry Maulana Husain^{2*}, Ri Sabti Septarini³

95 - 106

¹ Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Kebijakan Pro-UMKM Dalam Hilirisasi Produk Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kepulauan Riau

Eki Darmawan^{1*}, Adhe Fadli Farhan¹, Azrul Asyikin¹, Akhdiva Elfi Istiqoh¹, Ida Rahayu¹, Rio Ramadan¹

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Correspondence email: ekidarmawan@umrah.ac.id

Received: 30 October 2025; Accepted: 24 November 2025; Published: 30 November 2025
doi: [10.31000/cswb.v5i2.15153](https://doi.org/10.31000/cswb.v5i2.15153)

Abstract: The Community Service Program of Expertise of the Riau Islands Dekranasda is a strategic collaboration between Raja Ali Haji Maritime University and the Regional National Crafts Council of the Riau Islands Province. The main objective of this activity is to strengthen the capacity of MSMEs in the downstreaming of creative economy-based tourism products through increasing legal literacy, Intellectual Property Rights certification, and public policy advocacy. The implementation method uses a participatory approach through a policy dialogue forum and technical assistance for IPR registration. The results of this activity show a significant increase in participant knowledge (the average score increased from 4.58 to 4.71) as well as increased legal awareness and business motivation. The policy forum also produced strategic recommendations for strengthening the role of MSMEs in tourism development planning. This article discusses the academic-government-community (pentahelix) collaboration model in promoting the legitimacy and competitiveness of local products in the maritime region.

Keyword: UMKM; Dekranasda; Hilirisasi, Pentahelix

PENDAHULUAN

Peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu strategi kunci dalam mendorong ketahanan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan di tingkat lokal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh sektor UMKM, dan lebih dari 97% tenaga kerja nasional berada di sektor ini. Namun demikian, di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), potensi besar tersebut belum termanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kapasitas manajerial, rendahnya literasi hukum dan bisnis, serta lemahnya jejaring pemasaran lintas wilayah. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pembinaan dan pengembangan UMKM. Keterbatasan infrastruktur distribusi, akses permodalan yang belum merata, serta disparitas antarwilayah menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha lokal. Di sisi lain, Kepri memiliki



keunggulan komparatif yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu potensi *maritime creative economy*—ekonomi kreatif berbasis sumber daya maritim dan budaya pesisir Melayu. Produk-produk khas seperti tenun Melayu, anyaman pandan, kerajinan cangkang, serta kuliner berbasis hasil laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ikon pariwisata daerah.

Namun, nilai tambah dari sektor tersebut masih rendah karena sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Minimnya pemahaman terhadap HKI menyebabkan banyak produk lokal mudah ditiru, sehingga kehilangan nilai otentisitas dan peluang ekspor. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah terkait UMKM dan ekonomi kreatif masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dalam konteks inilah, Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kepakaran Dekranasda Kepulauan Riau menjadi intervensi penting. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri yang memiliki mandat memperkuat kapasitas UMKM melalui pendekatan multidisipliner. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum, literasi bisnis, dan advokasi kebijakan publik yang berpihak kepada UMKM. PKM Kepakaran Dekranasda menggunakan paradigma *knowledge-based community empowerment*, yaitu penguatan kapasitas masyarakat berbasis pengetahuan ilmiah dan lokalitas budaya. Melalui pelatihan, forum dialog kebijakan, dan pendampingan pendaftaran HKI, kegiatan ini tidak hanya memperluas pemahaman pelaku UMKM, tetapi juga menciptakan ruang kolaboratif antara akademisi, birokrasi, komunitas, media, dan pelaku bisnis — sebuah bentuk nyata dari sinergi *pentahelix*.

Lebih lanjut, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh hasil riset internal UMRAH yang mengidentifikasi beberapa permasalahan mendasar UMKM mitra Dekranasda, yakni: (1) rendahnya pemahaman tentang prosedur legalitas usaha, (2) minimnya kemampuan pengemasan dan desain produk yang menarik bagi pasar wisata, (3) kurangnya integrasi antara kebijakan ekonomi kreatif dan promosi pariwisata, serta (4) lemahnya jejaring pemasaran digital. Keempat faktor ini menjadi dasar perancangan program kepakaran yang menggabungkan unsur pendidikan, pendampingan, dan advokasi. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini mengacu pada prinsip-prinsip pengabdian berbasis riset (*research-based service*), di mana setiap kegiatan dirancang berdasarkan hasil kajian empiris dan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam hal ini, UMRAH bertindak sebagai pusat penghasil pengetahuan (*knowledge center*), sementara Dekranasda menjadi mitra implementatif yang menjembatani akademisi dan pelaku usaha. Keterlibatan aktif kedua pihak ini mencerminkan penerapan konsep *co-creation* — di mana pengetahuan dan solusi tidak datang sepihak dari akademisi, tetapi dibangun bersama dengan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, program ini juga berupaya menanamkan kesadaran baru tentang pentingnya perlindungan HKI dalam menghadapi era ekonomi digital. Di tengah persaingan global, HKI bukan hanya instrumen hukum, melainkan juga alat strategis dalam memperkuat daya saing produk lokal. Pelaku UMKM yang memiliki merek dagang dan desain kemasan terlindungi akan lebih mudah menembus pasar

modern, baik nasional maupun internasional. Dengan demikian, pelaksanaan PKM Kepakaran Dekranasda bukan sekadar kegiatan pelatihan jangka pendek, melainkan sebuah intervensi sosial dan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy advocacy*) untuk memperkuat posisi UMKM Kepri dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa universitas tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Melalui artikel ini, penulis ingin menegaskan bahwa model PKM berbasis kepakaran dan kolaborasi lintas sektor dapat dijadikan model replikasi nasional untuk daerah-daerah kepulauan lain di Indonesia, dengan adaptasi sesuai karakteristik lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong keberlanjutan usaha kecil, memperkuat identitas budaya, dan menciptakan sinergi pembangunan yang lebih inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan pendekatan strategis dalam pengabdian masyarakat yang bertujuan menguatkan kapasitas individu dan komunitas untuk mengelola sumber daya mereka sendiri secara berkelanjutan. Menurut Chambers (1997), pemberdayaan berarti memberikan “kuasa” kepada masyarakat agar mampu mengendalikan keputusan dan tindakan yang memengaruhi hidup mereka. Dalam konteks UMKM, pemberdayaan tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga akses terhadap informasi, legalitas, dan jaringan pasar. PKM Kepakaran Dekranasda mengadopsi model pemberdayaan partisipatif di mana pelaku UMKM tidak diposisikan sebagai objek penerima bantuan, tetapi sebagai subjek aktif yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *participatory development* (Oakley, 1991) yang menekankan keterlibatan masyarakat sebagai inti pembangunan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) atas program dan memperkuat keberlanjutan pasca intervensi.

Kegiatan forum dialog kebijakan dan pendampingan HKI dalam program ini menjadi bentuk nyata penerapan teori pemberdayaan: (1) meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan, (2) memperluas akses terhadap sumber daya (legalitas dan jejaring), serta (3) mendorong otonomi pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Konsep *Triple Helix* yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) menegaskan pentingnya sinergi antara tiga aktor utama pembangunan: akademisi, pemerintah, dan sektor industri. Sinergi ini menciptakan lingkungan inovatif yang memungkinkan aliran pengetahuan dan sumber daya lintas sektor. Dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah, model ini terbukti mampu mempercepat transformasi pengetahuan menjadi nilai ekonomi. Namun, dalam konteks sosial budaya seperti di Kepulauan Riau, model *Triple Helix* dianggap perlu diperluas menjadi *Pentahelix* dengan melibatkan dua aktor tambahan: komunitas dan media. Model *Pentahelix* menempatkan masyarakat

sebagai pusat inovasi sosial dan media sebagai kanal diseminasi yang memperkuat jejaring komunikasi antar aktor.

PKM Kepakaran Dekranasda secara eksplisit mengimplementasikan prinsip *Pentahelix* melalui kolaborasi lintas Lembaga. Pendekatan ini memperkuat proses *co-creation* dan *co-implementation*, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar kontekstual dan aplikatif bagi masyarakat lokal. Hasil forum dialog menunjukkan bahwa model ini efektif dalam mempertemukan aspirasi UMKM dengan kebijakan pemerintah, sekaligus menciptakan jembatan komunikasi antar pihak yang sebelumnya terpisah. Literasi hukum menjadi elemen fundamental dalam memperkuat kapasitas UMKM, terutama di era ekonomi digital. Menurut Kementerian Hukum dan HAM (2022), hanya sekitar 10% pelaku UMKM nasional yang memiliki sertifikasi HKI—angka yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum. Dalam konteks ekonomi kreatif, HKI berfungsi tidak hanya sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai instrumen komersialisasi nilai budaya. Perlindungan HKI memastikan bahwa kreativitas pelaku UMKM terlindungi dari plagiarisme dan dapat diubah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai jual. Konsep ini sejalan dengan teori *Intellectual Capital* (Edvinsson & Malone, 1997), di mana pengetahuan dan kreativitas merupakan sumber daya utama dalam menciptakan nilai ekonomi baru.

Program ini memfokuskan kegiatan pendampingan HKI sebagai bentuk literasi hukum terapan. Pendampingan ini mencakup pelatihan pengisian formulir daring, identifikasi jenis HKI yang sesuai (merek, desain industri, hak cipta), serta simulasi pendaftaran melalui sistem Kemenkumham. Pendekatan praktis ini efektif mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM di daerah. Dengan meningkatnya literasi HKI, pelaku usaha mulai memahami hubungan antara legalitas, branding, dan daya saing. Produk yang memiliki perlindungan hukum tidak hanya lebih aman dari penjiplakan, tetapi juga lebih menarik bagi investor dan mitra bisnis. Hal ini memperkuat daya saing regional Kepulauan Riau dalam pasar ekonomi kreatif ASEAN yang menuntut keaslian dan legitimasi produk. Konsep hilirisasi produk pariwisata berakar pada teori rantai nilai (*value chain theory*) yang diperkenalkan oleh Porter (1985). Dalam konteks UMKM, hilirisasi berarti memperluas kegiatan ekonomi dari tahap produksi menuju tahap pengolahan, pengemasan, sertifikasi, dan distribusi. Produk lokal tidak lagi hanya dijual sebagai bahan mentah, melainkan sebagai bagian dari pengalaman wisata (*tourism experience*).

Program ini mengaitkan hilirisasi dengan penguatan branding lokal dan perlindungan HKI. Melalui forum kebijakan, peserta memahami bahwa keberhasilan hilirisasi bergantung pada empat faktor: (1) kemudahan regulasi, (2) dukungan promosi lintas sektor, (3) legalitas usaha dan HKI, serta (4) kolaborasi multi-aktor. Model integratif ini mendukung terciptanya *value chain* yang berkelanjutan antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor pariwisata. Beberapa penelitian terdahulu mendukung efektivitas pendekatan yang digunakan dalam PKM Kepakaran Dekranasda. Penelitian Rahayu et al. (2025) menemukan bahwa integrasi antara pelatihan hukum dan advokasi kebijakan mampu meningkatkan legitimasi usaha UMKM di Kepulauan Riau. Sementara itu, studi Fitriani (2022) menunjukkan bahwa kontribusi

pariwisata terhadap PAD Kepri masih rendah karena lemahnya hilirisasi kebijakan. Hasil-hasil ini memperkuat argumen bahwa kegiatan pengabdian seperti PKM Dekranasda dapat menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan.

METODE

Program ini dilaksanakan selama rentang waktu Juli–September 2025 bertempat di Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang. Peserta terdiri dari 35 pelaku UMKM mitra Dekranasda yang bergerak di bidang fashion dan kriya, kuliner, dan desain berbasis budaya Melayu, namun saat pelaksanaan kegiatan yang hadir sebanyak 34 peserta. Kegiatan terdiri dari dua komponen utama; (1) Forum Dialog Kebijakan Pro-UMKM, melibatkan akademisi dan komunitas bisnis untuk membahas akses permodalan, legalitas usaha, dan integrasi produk ke sektor pariwisata; (2) Pendampingan Sertifikasi dan pengemasan produk, berupa pelatihan praktis dan sesi bimbingan individu untuk pendaftaran merek dagang, desain industri, dan hak cipta. Data dikumpulkan melalui *pre-test* dan *post-test* serta survei kualitatif. Analisis statistik dilakukan dengan uji-t berpasangan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta terhadap hilirisasi produk dan analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi persepsi, tantangan, dan rekomendasi dari peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program *Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kepakaran Dekranasda* menggunakan desain kegiatan partisipatif kolaboratif (*collaborative participatory approach*). Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif antara akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM dalam setiap tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Model ini dipilih karena sesuai dengan tujuan program, yakni menciptakan peningkatan kapasitas UMKM berbasis kebutuhan riil lapangan dan mendukung pembangunan ekonomi kreatif daerah. Kegiatan dirancang melalui tiga fase utama:

1. Pra-kegiatan (diagnosis sosial): dilakukan observasi, wawancara singkat, dan survei kebutuhan terhadap pelaku UMKM binaan Dekranasda untuk mengidentifikasi permasalahan aktual terkait legalitas usaha, kemasan produk, serta pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Pelaksanaan (implementasi kegiatan): terdiri atas sesi pelatihan interaktif, forum dialog kebijakan, serta pendampingan teknis untuk pendaftaran sertifikasi baik HKI, Halal maupun sejenisnya.
3. Pasca-kegiatan (evaluasi dan tindak lanjut): meliputi pengukuran hasil menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*, serta pengumpulan testimoni peserta sebagai umpan balik kualitatif.

Program dilaksanakan di Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, pada bulan Juli hingga September 2025. Peserta kegiatan berjumlah 35 pelaku UMKM, dengan latar belakang usaha yang beragam, meliputi fashion dan kriya, kerajinan tangan, kuliner, dan produk olahan khas daerah. Kriteria pemilihan peserta mencakup: (1) UMKM aktif yang telah beroperasi minimal satu tahun; (2) Belum memiliki legalitas usaha atau

sertifikasi HKI; (3) Memiliki potensi produk berbasis budaya lokal. Kegiatan juga melibatkan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMRAH, serta pengurus Dekranasda Provinsi Kepri sebagai mitra pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan mengikuti tahapan sistematis meliputi tahap Persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi serta refleksi. Kegiatan ini menggunakan prinsip *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yang dikembangkan oleh Chambers (1994), di mana masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Setiap sesi pelatihan dirancang interaktif dengan metode *two-way learning*, yaitu fasilitator tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menggali pengalaman peserta sebagai bahan diskusi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri, menawarkan solusi, dan menetapkan prioritas pengembangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya bersifat top-down, melainkan mengadopsi pendekatan *bottom-up* yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, digunakan dua jenis data yakni data kualitatif dan data kuantitatif berupa kuesioner, instrument wawancara singkat dan lembar refleksi yang berisi kesan, pesan, serta harapan peserta terhadap kegiatan. Analisis dilakukan dengan teknik *thematic analysis* untuk menemukan pola tema dominan, seperti peningkatan motivasi usaha, apresiasi terhadap pelatihan, dan kebutuhan kegiatan lanjutan. Validitas instrumen diuji reliabilitasnya dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,87, menunjukkan tingkat konsistensi internal yang tinggi. Untuk data kualitatif, keabsahan dijamin melalui *triangulasi sumber*, yaitu membandingkan hasil refleksi peserta, catatan fasilitator, dan laporan kegiatan resmi Dekranasda. Pendekatan ini memastikan hasil analisis memiliki dasar empiris yang kuat dan tidak bias. Hasil kedua pendekatan ini dikombinasikan dalam model *mixed-method integration*, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kegiatan baik dari segi capaian pengetahuan maupun dampak sosialnya.

Pelaksanaan kegiatan mengikuti prinsip etika pengabdian masyarakat, antara lain:

1. Mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan peserta.
2. Menjamin kerahasiaan data pribadi responden.
3. Menghindari paksaan dalam proses evaluasi dan refleksi.
4. Menyediakan umpan balik hasil kegiatan kepada peserta sebagai bentuk akuntabilitas public.

Pelaksanaan program *Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kepakaran Dekranasda* dengan tema "*Kebijakan Pro-UMKM dalam Hilirisasi Produk Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau*" telah berlangsung dengan baik sesuai rencana. Kegiatan ini melibatkan 34 pelaku UMKM mitra Dekranasda yang bergerak dalam bidang kriya, kuliner, dan produk kreatif berbasis budaya Melayu pesisir. Program difokuskan pada dua kegiatan utama, yaitu forum dialog kebijakan pro-UMKM dan pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan ini berhasil membangun ruang partisipatif bagi pelaku UMKM untuk memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai ekonomi kreatif pariwisata. Dalam forum dialog,

peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, seperti akses terhadap permodalan, kesulitan pendaftaran HKI, dan keterbatasan promosi digital. Dari diskusi tersebut, muncul sejumlah rekomendasi kebijakan yang berfokus pada pentingnya promosi terpadu, dukungan regulasi yang ramah UMKM, serta program pendampingan berkelanjutan.

Kegiatan pendampingan HKI menjadi salah satu capaian paling nyata. Sebagian besar peserta yang sebelumnya belum mengenal pentingnya perlindungan merek dagang kini memahami prosedur pendaftaran HKI dan manfaatnya dalam memperkuat daya saing produk. Peserta diarahkan untuk mengidentifikasi produk yang layak didaftarkan, menyiapkan dokumen legalitas, serta mengakses sistem daring Kementerian Hukum dan Kementerian HAM melalui Sentra HKI UMRAH. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan dua instrumen utama, yaitu *pre-test* dan *post-test*. Sebanyak 34 responden yang hadir selama dua sesi pelatihan mengisi kuesioner dengan skala Likert (1–5) dengan rangkuman hasil:

1. Jumlah aspek yang dinilai: 25 aspek
2. Rata-rata skor pre-test: 4,58
3. Rata-rata skor post-test: 4,71
4. Rata-rata kenaikan (gain): +0,13
5. Kategori peningkatan: Meningkatkan ringan, namun positif dan konsisten.

Peningkatan tertinggi tercatat pada aspek ketersediaan waktu diskusi (+0,45), responsivitas narasumber (+0,18), dan kemampuan narasumber dalam menguasai materi (+0,24). Beberapa aspek mengalami penurunan minor seperti kesesuaian jadwal kegiatan (-0,03) dan kejelasan contoh produk/kemasan (-0,06), namun tidak memengaruhi hasil akhir yang tetap berada pada kategori “sangat baik” ($\geq 4,5$). Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap topik HKI dan hilirisasi produk pariwisata. Skor pre-test yang relatif tinggi menggambarkan ekspektasi positif sejak awal, dan peningkatan pada post-test mengindikasikan bahwa kegiatan ini berhasil memenuhi bahkan melampaui harapan peserta. Dari hasil refleksi peserta, diperoleh beberapa tema utama yang menggambarkan persepsi terhadap manfaat kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Hukum.
Peserta menyatakan mendapatkan pengetahuan baru mengenai pentingnya legalitas usaha, HKI, dan branding produk. Mereka menilai bahwa pemahaman hukum memberikan rasa percaya diri dalam memperluas pasar, khususnya bagi pelaku usaha perempuan dan pengrajin tradisional.
2. Keterlibatan dalam Dialog Kebijakan.
Peserta merasa dihargai karena diberi ruang menyampaikan pendapat langsung kepada pemerintah daerah. Forum dialog dianggap sebagai pengalaman baru yang mempertemukan UMKM dengan pemangku kepentingan, dan diharapkan menjadi agenda rutin dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
3. Peningkatan Jejaring Sosial dan Kemitraan.

Melalui kegiatan ini, terbentuk jejaring antar pelaku UMKM dan instansi terkait. Peserta menyebut adanya rencana kolaborasi baru dengan pihak hotel, toko souvenir, dan komunitas pariwisata dalam pemasaran produk lokal.

4. Dampak Sosial dan Motivasi Usaha.

Peserta mengaku kegiatan ini menumbuhkan semangat baru untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Kegiatan ini juga memperkuat rasa kebersamaan di antara pelaku usaha, menciptakan solidaritas komunitas yang lebih erat.

Pesan umum dari peserta antara lain:

1. "Kegiatan ini sangat bermanfaat, semoga dapat berlanjut secara rutin."
2. "Pendampingan HKI perlu terus dilakukan agar UMKM Kepri bisa punya produk yang legal dan berdaya saing."
3. "Kami butuh pelatihan lanjutan untuk pemasaran digital dan pengemasan produk."

Pesan-pesan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga membangun optimisme kolektif terhadap masa depan UMKM daerah.

KESIMPULAN

Program *Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Umrah dengan Dekranasda Kepulauan Riau* dengan tema "*Kebijakan Pro-UMKM dalam Hilirisasi Produk Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau*" telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam literasi hukum, hilirisasi produk, dan partisipasi dalam forum kebijakan publik. Pelaksanaan kegiatan melalui dua bentuk utama forum dialog kebijakan dan pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah memberikan dampak nyata bagi peserta. Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dari rata-rata skor 4,58 menjadi 4,71. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa metode pelatihan interaktif dan berbasis praktik langsung efektif dalam memperkuat pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha.

Dari sisi kualitatif, peserta menunjukkan perubahan positif dalam kesadaran hukum, motivasi berwirausaha, serta pemahaman terhadap nilai strategis HKI sebagai instrumen perlindungan dan penguatan identitas produk. Selain manfaat individual, kegiatan ini juga menciptakan dampak sosial berupa terbentuknya jejaring antarpelaku UMKM, akademisi, dan instansi pemerintah yang dapat berkembang menjadi wadah kolaborasi berkelanjutan. Forum dialog kebijakan yang dilaksanakan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait peningkatan dukungan kebijakan publik bagi sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Temuan lapangan menegaskan bahwa keterlibatan langsung pelaku usaha dalam proses perumusan kebijakan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi program ekonomi lokal.

Secara konseptual, kegiatan ini membuktikan relevansi model kolaborasi *Pentahelix* sebagai pendekatan efektif dalam mendorong inovasi sosial dan ekonomi. Universitas berperan sebagai penghasil pengetahuan,

pemerintah sebagai fasilitator kebijakan, dan pelaku UMKM sebagai penggerak ekonomi riil. Interaksi lintas sektor ini menjadi modal utama dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PKM Kepakaran Dekranasda tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi mitra binaan, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi dan advokasi kebijakan publik.

SARAN

1. Pendampingan HKI Berkelanjutan perlu diperkuat melalui kegiatan *coaching clinic* dan bimbingan teknis kolektif agar pelaku UMKM mampu menyelesaikan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual secara mandiri dan memperoleh perlindungan hukum yang sah atas produknya.
2. Integrasi hasil program ke dalam kebijakan daerah harus dioptimalkan, dengan cara menjadikan rekomendasi forum dialog dan temuan lapangan sebagai bagian dari dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Musrenbang, sehingga kebijakan pro-UMKM memiliki dasar empiris dan implementatif.
3. Penguatan literasi digital dan branding produk menjadi kebutuhan prioritas, mengingat pemasaran daring dan pengemasan kreatif merupakan faktor kunci peningkatan daya saing UMKM di era ekonomi digital dan sektor pariwisata berbasis pengalaman.
4. Akses modal dan kemitraan strategis perlu diperluas melalui sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor swasta agar pelaku UMKM memiliki dukungan permodalan serta jaringan pemasaran yang berkelanjutan.
5. Pemantauan dan evaluasi berkala penting dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pelatihan diterapkan oleh peserta di lapangan, serta memastikan keberlanjutan program pendampingan dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas di komunitas.

REFERENCES

- Adams, E. K., Breen, N., & Joski, P. J. (2007). *Impact of the National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program on Mammography and Pap Test Utilization among White, Hispanic, and African American Women: 1996–2000*. *Cancer*, 109(S2), 348–358.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1997). *Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower*. New York: HarperBusiness.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Fitriani, R. (2022). *Kontribusi Pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau dan Implikasinya terhadap Hilirisasi Produk Kreatif*. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 4(1), 44–56.

- Hanafi, M., Naili, N., Salahudin, N., & Riza, A. K. (2015). *Community-Based Research: Sebuah Pengantar*. Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022*. Jakarta: DJKI Kemenkumham RI.
- Muhid, A., Sumarkan, R., Rakhmawati, & Fahmi, L. (2018). Perubahan perilaku Open Defecation Free (ODF) melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *Engagement: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 99–119.
- Oakley, P. (1991). *Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development*. Geneva: International Labour Office.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
- Rahayu, I., dkk. (2025). *Pemetaan Masalah UMKM Mitra Dekranasda dalam Hilirisasi Produk Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau*. Laporan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Wantini, N. A. (2018). Efek promosi kesehatan terhadap pengetahuan kanker payudara pada wanita di Dusun Terongan, Desa Kebonrejo, Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. *Jurnal Medika Respati*, 13(1), 8–15.